

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

UPTD atau Unit Pelaksanaan Teknis Daerah merupakan bagian dari Dinas yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang. Program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja di wilayah Kabupaten Bandung. Namun, efektivitas program ini sering menjadi sorotan, terutama dalam hal pencapaian tujuan dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bandung memberikan berbagai macam jenis pelatihan antara lain yakni, teknik pelatihan Menjahit, Bordir, Teknisi HP, Otomotif Motor, Otomotif Mobil, dan Teknik Pengelasan. Pelatihan dilaksanakan selama 30 hari kerja yakni Senin-Jumat untuk estimasi waktu per satu angkatan pelatihan yakni kurang lebih satu setengah bulan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung membentuk Balai Latihan Kerja (BLK) berdasarkan Perda No. 22 Tahun 2014 tentang penyelenggara sistem pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Bandung. BLK Kabupaten Bandung merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Bandung Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan

kualitas tenaga kerja ini dilakukan dengan pemberian keterampilan bagi pencari kerja, yakni tenaga kerja yang berkompeten dalam bidangnya, dan pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi.

Undang-Undang (UU) yang mengatur pelatihan kerja di tingkat nasional adalah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (SisLatKerNas). Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat yang mengatur pelatihan kerja adalah Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014. Perda ini mengatur tentang pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja di daerah. Pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh: LPK Swasta, LPK Pemerintah, LPK Perusahaan.

Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Bandung dalam lima tahun kebelakang ini terus ditingkatkan kualitasnya untuk meningkatkan pelayanan publik. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas SDM Pemerintah daerah Kabupaten Bandung dengan mengadakan kegiatan program pelatihan yang diadakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung.

Kabupaten Bandung memiliki berbagai data terkait sumber daya manusia (SDM) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Hasil observasi berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung peneliti pada bulan Maret Tahun 2025 menunjukkan bahwa meskipun program pelatihan berjalan cukup baik, masih terdapat aspek yang belum terpenuhi

untuk mencapai efektivitas optimal. Di UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Bandung, sekitar 60% peserta berhasil terserap dalam dunia kerja atau mendirikan usaha mandiri setelah mengikuti pelatihan, ini berarti sekitar 6 dari 10 peserta berhasil menjadi wirausaha setelah mengikuti pelatihan di BLK sementara 40% masih menganggur, ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian peserta yang belum berhasil terserap dunia kerja setelah pelatihan. Meskipun BLK berkontribusi positif, tantangan utama adalah memastikan bahwa semua peserta pelatihan mendapatkan pekerjaan atau memiliki kesempatan untuk berwirausaha.

Beberapa permasalahan dalam internal manajemen adalah anggaran yang terbatas dapat menghambat penyediaan fasilitas pelatihan yang memadai, kesulitan menentukan kebutuhan pelatihan yang relevan dengan pasar kerja dapat mengakibatkan pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kualitas instruktur termasuk pengetahuan, keterampilan dan kemampuan mengajar sangat berpengaruh terhadap keberhasilan manajemen dalam melaksanakan pelatihan. Manajemen harus dapat mengatasi masalah yang ada dan melaksanakan upaya peningkatan yang tepat, sehingga memberikan pengaruh positif bagi tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran.

Kendala yang ditemukan peneliti selama observasi dalam pelatihan terutama di bidang otomotif yaitu belum lengkap alat praktek, jadi jika setiap siswa mau menggunakan alat harus menunggu dulu jika terpakai oleh siswa lain, karena jumlah tenaga yang ikut praktek terdiri dari beberapa kelompok sehingga harus bergantian.

Permasalahan juga terdapat di Unit Pelaksana Teknis daerah yaitu Permasalahan seperti kurangnya interaksi, keterbatasan infrastruktur, minimnya sumber daya manusia, serta anggaran yang tidak memadai dapat berdampak langsung terhadap kepuasan peserta, karena layanan atau kegiatan yang diselenggarakan menjadi kurang maksimal, tidak responsif, dan cenderung tidak memenuhi ekspektasi peserta dan juga mempengaruhi input dan output program. Input seperti kualitas peserta, sarana, dan pelatihan menjadi kurang optimal, sehingga output yang dihasilkan baik dalam bentuk hasil belajar, kinerja, maupun pencapaian program juga tidak maksimal. Unit Pelaksana Teknis Daerah sendiri memiliki tugas pokok yaitu dalam perencanaan, pelaksanaan, penyusunan, monitoring, dan pengelolaan data terkait pelatihan kerja. Selain itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah bagi pemerintahan berfungsi sebagai pendistribusian tugas dalam lingkup tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Daerah, koordinasi dengan instansi daerah lain, penyusunan pedoman pelatihan, pengelolaan anggaran dalam pertanggungjawaban UPTD dan Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja.

Konsep MTU atau *Mobile Training* unit digunakan sebagai langkah antisipatif bagi masyarakat yang bermukim di daerah yang jauh dengan kabupaten sehingga dapat tetap mengikuti pelatihan misalnya di Kantor Kecamatan atau balai desa tergantung permintaan dari pihak kecamatan setempat. Kemudian dari segi instruktur pelatihan menurut Kepala UPTD BLK masih kurang. Untuk pengadaan instruktur dari PNS/ASN sendiri juga masih dalam rencana. Melihat beberapa program pelatihan

yang dilaksanakan UPTD BLK Kabupaten Bandung ini, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang Efektivitas Program Pelatihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, agar observasi dan analisis hasil penelitian lebih terarah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka untuk mencerminkan suatu masalah lebih spesifik pada, dan dapat memberikan kejelasan, karena ingin mengetahui gambaran program pelatihan yang dilaksanakan oleh UPTD maka fokus penelitian diarahkan pada Efektivitas Program Pelatihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan perumusan masalah untuk mengurangi permasalahan agar lebih spesifik dalam memberikan penjelasan. Antara lain:

1. Bagaimanakah Program Pelatihan Kerja Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung?
2. Faktor Apa saja yang mendukung efektivitas Program Pelatihan Kerja Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Bandung?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dibagian sebelumnya, maka tujuan dalam pembahasan yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan gambaran efektivitas program Pelatihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung.
2. Untuk menemukan faktor apa saja yang mendukung efektivitas program Pelatihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki kegunaan yang bersifat teoritis tetapi mempunyai kegunaan dalam praktis dan akademik.

- 1) Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu Administrasi Publik, terutama dalam keefektivitasan suatu program pemerintah. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian yang berhubungan dengan efektivitas program terutama sumber daya manusia.
- 2) Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sarana atau bahan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan yang khususnya dapat memecahkan masalah dalam memaksimalkan efektivitas program pemerintah.